

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2018

Devi Nanda Dwi Oktavian¹ dan Puji Astuti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail : devinandadwioktavian@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail : Pujiastuti208@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat potensi dan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbeda sehingga penerimaan pendapatan setiap daerah berbeda. Sumber keuangan asli daerah yang seharusnya menjadi sumber keuangan utama daerah, namun ternyata jumlah DAU yang besar memicu adanya ketergantungan daerah pada pusat. Ditambah dengan perencanaan keuangan APBD pemda yang kurang ideal menjadikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran APBD belum optimal. Penelitian ini menggunakan variabel pajak daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen, dengan pendekatan penelitian kuantitatif termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini pemerintah daerah di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga didapatkan 76 sampel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian ini maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah, DAU, dan retribusi daerah, sedangkan variabel belanja modal tidak. Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini yaitu (1) pemda harus lebih mengembangkan sektor perekonomian agar penerimaan pajak daerah meningkat, (2) pemda harus lebih intensif dalam penggunaan dan pengelolaan DAU untuk kegiatan yang memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, (3) pemda harus lebih memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada serta harus lebih meningkatkan kualitas SDM untuk pengelolaannya, (4) pemda harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar penerimaan retribusi daerah juga meningkat.

Kata Kunci: Pajak daerah, Dana alokasi umum, Belanja modal, Retribusi daerah, Kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah antara lain mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat, terciptanya sarana prasarana yang baik, memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumberdaya dari daerahnya sendiri, serta mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik.

Dengan diterapkannya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah harus mengelola secara mandiri keuangan daerahnya agar proses pembangunan yang dilakukan bisa terselesaikan tanpa menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat oleh sebab itu pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD). PAD digunakan oleh

pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan daerahnya sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat diminimalkan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan mampu memberi kontribusi lebih besar di dalam penerimaan PAD. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah berhak melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi kepada seluruh masyarakat daerahnya dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku disuatu daerah tersebut.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selain PAD sumber pendapatan lain yang diterima oleh pemda adalah dana alokasi umum. DAU adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang sumbernya dari APBN untuk tujuan mendorong kemandirian daerah dan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai keperluan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2014).

Semakin banyak sumber pendapatan daerah seharusnya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pemda melakukan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk pelayanan publik. Agar pemda dapat menyediakan infrastruktur yang memadai, diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi dan tepat serta pengelolaan yang optimal dan efektif. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode guna menunjang pelayanan kepada masyarakat daerah, sekaligus sebagai kegiatan investasi bagi pemerintah daerah (Erliana, 2015).

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mengalami kendala, berkaitan dengan kesiapan daerah baik tingkat potensi, SDA, dan kemampuan setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah berbeda-beda, ditambah lagi dengan kualitas maupun kuantitas SDM yang berbeda pula. Mengakibatkan jumlah pendapatan terutama PAD setiap daerah berbeda, untuk daerah yang tingkat potensi daerahnya tinggi maka akan menguntungkan sebaliknya untuk tingkat potensi daerah yang rendah akan merugikan. Selain PAD pemda juga menerima DAU dari pemerintah pusat. Besarnya jumlah DAU yang diterima menunjukkan semakin kuat pemda bergantung kepada pemerintah pusat di dalam memenuhi keperluan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan menurun atau kurang baik.

Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dalam penyelenggaraan desentralisasi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan (Halim, 2016). Jadi kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya tercermin dari kinerja keuangan tersebut. Kinerja keuangan bisa diukur dari seberapa besar kemampuan pemda dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki daerah sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Selain itu transparansi dan akuntabilitas pemda juga akan memberi kontribusi dalam penilaian kinerja keuangan pemda.

Dalam praktek penyusunan dan perencanaan laporan keuangan pemerintah daerah masih mengalami kendala antara lain perencanaan keuangan pemerintah daerah yang dinilai kurang ideal seiring dengan porsi belanja pegawai yang mendominasi ketimbang belanja modal, menurut penelitian *Institute For Development Of Economics And Finance (Indef)* Rusli Abdullah menilai penggunaan APBD masih cenderung berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan bukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian sehingga menjadikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran APBD belum optimal. Ditambah lagi acara kunjungan kerja komite IV DPD dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2019 di Sidoarjo pada Selasa (22/10/2019), yang menyatakan ada 3 pemerintah

daerah di Jawa Timur yang mendapat sorotan DPD RI terkait laporan keuangan yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel independen pada penelitian ini menggunakan pajak daerah, DAU, belanja modal, dan retribusi daerah. Sedangkan variabel dependen menggunakan kinerja keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan pada penelitian ini adalah rasio desentralisasi fiskal. Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemda mampu menyelenggarakan desentralisasi dalam memenuhi keperluan pemerintahan dengan membandingkan total PAD yang diterima dengan total pendapatan daerah.

Pendekatan dan teknik penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan data tanpa membuat kesimpulan untuk generalisasi (Sugiyono, 2016). Populasi penelitian ini yaitu seluruh Pemda di Jawa Timur, sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling* jenuh, sehingga diperoleh 76 sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2017-2018. Prosedur pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa dokumentasi. Metode analisis data menggunakan *software* SPSS 23. Data diuji dengan uji asumsi klasik dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan modal persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM + \beta_4 RD + e$$

Keterangan:

- Y = kinerja keuangan
- α = konstanta
- β_1 = koefisien regresi pajak daerah
- β_2 = koefisien regresi dana alokasi umum
- β_3 = koefisien regresi belanja modal
- β_4 = koefisien regresi retribusi daerah
- PD = jumlah pajak daerah
- DAU = jumlah dana alokasi umum
- BM = jumlah belanja modal
- RD = jumlah retribusi daerah
- e = error

HASIL PENELITIAN

a. Analisis Dekriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PAJAK DAERAH | 76 | 20557363425,00 | 3817402592324,00 | 238050385576,53 | 601337132241,36 |
| DAU | 76 | 378916109000,00 | 1697477217000,00 | 948282108125,07 | 303310210185,81 |
| BELANJA MODAL | 76 | 119434272447,00 | 2517891658246,00 | 432449918999,86 | 373073566199,89 |
| RETRIBUSI | 76 | 4609203050,00 | 557966574670,00 | 37905165636,5921 | 72946280357,820 |
| KINERJA KEUANGAN | 76 | 7,97 | 64,25 | 18,4226 | 9,78022 |
| Valid N (listwise) | 76 | | | | |

Berdasarkan hasil pengelolaan data melalui metode deskriptif pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah, nilai minimum sebesar Rp. 20.557.363.425,- diperoleh Kabupaten Sampang tahun 2017. Nilai maksimum sebesar Rp. 3.817.402.592.324,- diperoleh Kota Surabaya tahun 2018.
- 2) DAU, nilai minimum sebesar Rp. 378.916.109.000,- diperoleh Kota Mojokerto tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp. 1.697.477.217.000,- diperoleh Kabupaten Jember tahun 2018.
- 3) Belanja modal, nilai minimum sebesar Rp. 119.434.272.447,- diperoleh Kota Mojokerto tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp. 2.517.891.658.246,- diperoleh Kota Surabaya tahun 2017.
- 4) Retribusi daerah, nilai minimum sebesar Rp. 4.609.203.050,- diperoleh Kota Batu tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp. 557.966.574.670,- diperoleh Kota Surabaya tahun 2017.
- 5) Kinerja Keuangan, nilai minimum sebesar 7,97% diperoleh Kabupaten Sampang tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 64,25% diperoleh Kota Surabaya tahun 2017.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini menggunakan 3 metode, yaitu sebagai berikut:

- a) Hasil uji dari *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan data berdistribusi normal, dibuktikan dengan nilai *asym.sig. (2-tailed)* sebesar $0,080 > 0,05$.
- b) Hasil uji dari *Normal P-P Plot* menunjukkan data berdistribusi normal, dibuktikan dengan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola berdistribusi normal.
- c) Hasil uji histogram menunjukkan data berdistribusi mendekati normal, dibuktikan dengan kurva sedikit melenceng ke kanan akan tetapi masih dikatakan normal karena model regresi yang baik bila mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas, dibuktikan dengan nilai *tolerance* dari variabel pajak daerah, DAU, belanja modal, dan retribusi daerah masing-masing menunjukkan nilai 0,349; 0,411; 0,250; 0,264 yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang masing-masing variabel menunjukkan nilai 2,865; 2,434; 4,000; 3,782 yang lebih kecil dari 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dibuktikan dengan tidak ada pola yang jelas dan data menyebar secara acak dibawah maupun diatas angka 0 pada sumbu Y.

4) Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi menunjukkan model regresi penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi, dibuktikan dengan nilai du sebesar 1,739 lebih kecil dari DW yaitu 1,876 dan DW lebih kecil dari nilai 4-du sebesar 2,261 atau $1,739 < 1,876 < 2,261$.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda persamaan regresi yang diperoleh untuk menunjukkan pengaruh pajak daerah, DAU, belanja modal, dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,731 + 0,301 PD - 0,639 DAU + 0,060 BM + 0,109 RD$$

1) Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R square* diperoleh sebesar 0,813 atau 81,3%, menunjukkan variabel independen (pajak daerah, DAU, belanja modal, dan retribusi daerah) mampu menjelaskan variasi variabel kinerja keuangan sebesar 81,3% dan sisanya sebesar 18,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

2) Uji t

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai sig variabel pajak daerah sebesar 0,000. Nilai sig $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- Nilai sig variabel DAU sebesar 0,000. Nilai sig $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- Nilai sig variabel belanja modal sebesar 0,421. Nilai sig $0,421 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- Nilai sig variabel retribusi daerah sebesar 0,029. Nilai sig $0,029 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3) Uji F

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai sig sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa pajak daerah, DAU, belanja modal dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan

Sebagai salah satu komponen dari PAD, pajak daerah menjadi sumber keuangan yang mendominasi penerimaan PAD berdasarkan LRA tahun 2017-2018. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam APBD maka semakin tinggi kemampuan pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini berarti pemda telah menyelenggarakan desentralisasi dengan baik karena dapat memenuhi keperluan pemerintahan dengan jumlah penerimaan PAD yang lebih dominan.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti sumber PAD sudah dikelola dengan baik oleh pemda sehingga sektor perekonomian suatu daerah berkembang dengan baik dan memiliki dampak pada peningkatan pajak daerah yang

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2017) dan Farisi (2015) yang menunjukkan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2) Pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan

Sebagai salah satu komponen dari dana perimbangan, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemda untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, diharapkan dapat mendorong kreativitas dan keefektifan pemda dalam pengelolaannya sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemda.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan DAU berpengaruh namun secara negatif terhadap kinerja keuangan, yang berarti DAU yang sudah dialokasikan untuk pemda belum dapat meningkatkan kinerja keuangan pemda, hal ini bisa terjadi karena pemda kurang selektif dan intensif dalam pengalokasiannya sehingga pemda masih bergantung pada DAU untuk memenuhi keperluan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prastiwi (2020) dan Andirfa (2016) yang menunjukkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

3) Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan

Belanja modal merupakan pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemda dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat serta digunakan untuk menambah aset atau kekayaan daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode anggaran. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menunjang kegiatan diberbagai sektor dan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan termasuk pertumbuhan ekonomi yang merupakan proyeksi dari kinerja keuangan.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti dana yang telah dialokasikan untuk belanja modal belum dikelola dengan optimal sehingga tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini dapat terjadi apabila penambahan aset dan infrastruktur yang dilakukan pemda kurang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta tenaga SDM yang belum kompeten dalam mengelolanya, sehingga walaupun infrastruktur di tambah akan tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami perubahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2017) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4) Pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan

Sebagai salah satu komponen PAD, retribusi daerah menjadi sumber penerimaan ketiga setelah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan LRA tahun 2017-2018. Semakin tinggi penerimaan retribusi daerah menunjukkan semakin baik pemda dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan penerimaan PAD, dimana jumlah PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemda mampu memenuhi keperluan daerah dengan dana PAD yang lebih dominan.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti pemda telah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan layak, sehingga penerimaan retribusi daerah menjadi meningkat dan berdampak pada kinerja keuangan pemda yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Farisi (2015) yang menunjukkan retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

- a. Hasil uji t menunjukkan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.
- b. Hasil uji t menunjukkan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.
- c. Hasil uji t menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.

- d. Hasil uji t menunjukkan retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.
- e. Hasil uji F menunjukkan pajak daerah, DAU, belanja modal dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Hasan, B., dan Shabri, A.M. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, (online), 5:3, tersedia : (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4523>), diunduh 12 Maret 2020.
- Erlina, Omar, S.R., dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta : Salemba Empat.
- Farisi, S. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Artikel Ilmiah FE UNP*, (online), tersedia : (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1651/1274>) diunduh 9 Maret 2020.
- Halim, A. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah - Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prastiwi, Nanda .D, dan Andri Waskita A. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, (online), 28:1, tersedia : (<http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/issue/view/4>), diunduh 11 Maret 2020.
- Sari, Renita .N. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Simki-Economic*, (online), tersedia : (http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/a32677813a0762bdd5b8b706c453e46b.pdf), diunduh 30 Maret 2020.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 23. Bandung : Penerbit Alfabeta.